

## Determinan Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung

Dedy Hermawan<sup>1</sup>, Yulianto<sup>2</sup>, Alamsyah<sup>3</sup>

- 1 Jurusan Administrasi Negara Fisip Universitas Lampung
- 2 Jurusan Administrasi Negara Fisip Universitas Lampung
- 3 Jurusan Administrasi Negara Fisip Universitas Sriwijaya

dedy.hermawan@fisip.unila.ac.id

### Abstrak

Perserikatan Bangsa – Bangsa telah mengubah terminologi Tujuan – Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) menjadi Tujuan – Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Perubahan ini semakin menguatkan pembangunan manusia sebagai salah satu pilar SDGs selain pembangunan ekonomi, pembangunan ekologi, dan penguatan kelembagaan. Salah satu alat ukur global yang digunakan di banyak negara untuk mengukur pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia. Hari ini, salah satu perdebatan akademik yang terus berlangsung adalah apa saja determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Bertolak dari data sekunder yang dimiliki Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Indonesia, artikel ini berupaya menganalisis hubungan antara variabel Rata – Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Pendapatan Per Kapita (PKP) terhadap IPM dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien RLS, HLS, AHH, dan PKP bernilai positif tetapi besaran kontribusi setiap IPM berbeda. Dari model ini diketahui bahwa RLS dan HLS memiliki efek lebih besar terhadap IPM jika dibandingkan dengan AHH dan PKP. Penelitian ini memberikan implikasi teoritis dan praktis, secara teoritis penelitian menguatkan hasil riset yang memosisikan IPM sebagai variabel dependen dan sekaligus menolak temuan riset yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan tidak berdampak signifikan terhadap IPM. Secara praktis, penelitian mendorong agar Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memprioritaskan sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat sebagai fokus pembangunan

**Kata kunci:** *pembangunan regional, pembangunan manusia, IPM, MDGs, SDGs*

### Abstract

United Nations has been changed Millennium Development Goals (MDGs) into Sustainable Development Goals (SDGs). This change has been strengthening human development as one of SDGs pillar beside economic development, ecology development, and institutional development. One of the global instruments to explain human development is the Human Development Index (HDI). Today, one of academic debate surrounding the HDI is what is the determinant of HDI. Based on secondary data in Central Lampung District, Lampung Province, Indonesia, this paper attempt to examine the relationship between independent variables (RLS, HLS, AHH, and PKP) and IPM as the dependent variable. The result shows that RLS, HLS, AHH, and PKP have a positive relationship with IPM. However, each variable has a different effect on IPM. We find that RLS and HLS is the most significant contributor for the IPM. We discuss the theoretical and practical implication this finding in the context of Lampung Province and Central Lampung District.

**Keywords:** *regional development, human development, HDI, MDGs, SDGs*

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan, terminologi yang muncul pasca Perang Dunia II, kembali menjadi pusat perhatian banyak pembuat kebijakan setelah sidang ke-17 Majelis Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 menyepakati resolusi nomor A/RES/70/1 yang bertajuk *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, atau populer dengan istilah *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan – Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (United Nations, 2015b).

SDGs menggantikan resolusi PBB tentang *Millennium Development Goals* (MDGs) atau Tujuan - Tujuan Pembangunan Milenium yang sudah kadaluwarsa. Secara konseptual, tidak ada perbedaan mendasar antara MDGs dan SDGs. Sebaliknya, SDGs lebih memiliki lebih banyak tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Dulu, di zaman MDGs, menanggulangi kemiskinan dan kelaparan adalah bagian dari Tujuan 1. Kini, di era SDGs, dua hal ini dipisah untuk menunjukkan tingkat urgensi tujuan ini bagi pembangunan global (lihat Tabel 1).

**Tabel 1. Perbedaan tujuan pembangunan antara MDGs dan SDGs**

Tujuan Pembangunan	MDGs	SDGs
Tujuan 1	Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan	Pengentasan semua bentuk kemiskinan di semua tempat
Tujuan 2	Mencapai Pendidikan dasar untuk semua	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan
Tujuan 3	Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Menggalakkan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua usia
Tujuan 4	Menurunkan angka kematian anak	Memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan layak serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang
Tujuan 5	Meningkatkan kesehatan ibu	Mencapai keadilan gender dan memberdayakan semua anak – anak perempuan dan perempuan dewasa
Tujuan 6	Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya	Menjamin ketersediaan dan manajemen air berkelanjutan, serta sanitasi untuk semua
Tujuan 7	Memastikan kelestarian lingkungan hidup	Memastikan akses semua orang kepada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern
Tujuan 8	Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan	Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, inklusif, serta lapangan pekerjaan dan

	pekerjaan yang layak untuk semua.
Tujuan 9	Membangun infrastruktur yang kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi
Tujuan 10	Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara
Tujuan 11	Membuat kota dan hunian manusia yang inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan
Tujuan 12	Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
Tujuan 13	Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya
Tujuan 14	Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
Tujuan 15	Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati
Tujuan 16	Mempromosikan masyarakat yang adil dan inklusif bagi pembangunan berkelanjutan, memberikan akses ke keadilan bagi dan sistem peradilan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level.
Tujuan 17	Memperkuat dan merevitalisasi implementasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

**Sumber: United Nations (2015b, 2015a)**

Jika disederhanakan, konsep SDGs dapat dikelompokkan menjadi tiga fokus: pembangunan manusia (Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4, Tujuan 5), pembangunan ekonomi (Tujuan 6, Tujuan 7, Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 10, Tujuan 11, Tujuan 12), pembangunan ekologi (Tujuan 12, Tujuan 14, Tujuan 15), dan pembangunan kelembagaan (Tujuan 16 dan Tujuan 17). Dalam konteks

pembangunan manusia, salah satu alat ukur global yang biasa digunakan untuk menilai pencapaian pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia yang diinisiasi Amartya Sen dan Mahbub ul Haq yang bertolak dari akses ke kesehatan, pendidikan, dan barang material (Stanton, 2007). Indonesia juga mengadopsi Indeks Pembangunan Manusia sebagai alat untuk melihat perkembangan tingkat

- 1 Jurusan Administrasi Negara Fisip Universitas Lampung
- 2 Jurusan Administrasi Negara Fisip Universitas Lampung
- 3 Jurusan Administrasi Negara Fisip Universitas Sriwijaya

kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa kasus, misalnya alokasi dana umum (DAU), angka IPM menjadi salah satu parameter yang digunakan Pemerintah Pusat untuk menentukan besaran dana DAU.

Dalam konteks perdebatan akademik, khususnya di Indonesia, riset empiris tentang IPM yang dilakukan para peneliti di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. *Pertama*, para peneliti yang memosisikan IPM sebagai variabel independen. Sebagai variabel bebas, IPM secara empiris berkontribusi positif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita (Hamid, 2014; Malik, 2014), praktik pemalsuan obat (Nuryunarsih, 2017), prevalensi balita pendek (Muljati, Triwinarto, & Budiman, 2011), kinerja pembangunan ekonomi (Amaliah, 2006). Tetapi, IPM berkontribusi negatif terhadap tingkat kemiskinan (Andykha, Handayani, & Woyanti, 2018) dan tingkat korupsi (Mariyono, 2012).

*Kedua*, para peneliti yang memosisikan IPM sebagai variabel dependen. Sebagai variabel terikat, beberapa peneliti Indonesia menunjukkan bahwa IPM dipengaruhi PDRB dan tenaga kerja (Hariwan & Swaningrum, 2015), pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur (Putra, 2017), belanja modal (Mirza, 2015; Sandri, Putri, & Dwirandra, 2016), rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita (Arthayanti, Srinadi, & Gandhiadi, 2017), jumlah penduduk (Sari & Priati, 2016), krisis ekonomi (Setiawan & Hakim, 2008), pendidikan (Maulana & Ariwibowo, 2013), pertumbuhan ekonomi (Hasbullah, Fauzi, Fatimah, Yuniarti, &

Syarifudin, 2013; Mirza, 2015), dana alokasi khusus (Saputra & Rizki, 2014), desentralisasi fiskal dan investasi swasta (Pramartha & Dwirandra, 2018), *gini ratio*, pengeluaran non makanan per kapita, dan laju pertumbuhan ekonomi (Rustariyuni, 2014), total aset pemerintah daerah (Mangkunegara, 2015), rasio derajat desentralisasi fiskal dan keserasian belanja langsung (Harliyani & Haryadi, 2016), pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan (Astri, Nikensari, & W., 2013). Tetapi, sebagian peneliti menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi (Dwiwandari & Badera, 2018), tingkat kemiskinan (Mirza, 2015), dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan pelayanan kesehatan, belanja modal tidak berdampak signifikan terhadap IPM (Mangkunegara, 2015; Putra, 2017).

Artikel ini berusaha berkontribusi dalam perdebatan di atas dengan menguji hubungan antara variabel bebas (Angka harapan Hidup, Rata - Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pendapatan per Kapita) terhadap IPM sebagai variabel terikat. Kabupaten Lampung Tengah dipilih sebagai lokasi penelitian karena skor IPM-nya berada dikategori sedang (68,33). Dalam bahasa statistik, kategori sedang berada di titik tengah-tengah karena lokasinya ada di antara kategori tinggi dan kategori rendah. Dengan kata lain, Lampung Tengah cukup representatif untuk mewakili seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Pada tataran praktis, riset ini menjadi penting dilakukan karena upaya meningkatkan IPM hanya tepat sasaran jika kita

mampu memahami peran setiap faktor pembentuk IPM.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif (Neuman, 2014). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Angka Harapan Hidup ( $X_1$ ), Rata - Rata Lama Sekolah ( $X_2$ ), Harapan Lama Sekolah ( $X_3$ ), dan Pengeluaran Per Kapita disesuaikan ( $X_4$ ). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (Y). Indeks Pembangunan Manusia (Y) didefinisikan sebagai rata-rata geometrik indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Sedangkan variabel bebas masing-masing didefinisikan sebagai: (a) rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir (Angka Harapan Hidup atau  $X_1$ ); (b) rata - rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas (Rata - Rata Lama Sekolah atau  $X_2$ ); (c) lamanya waktu bersekolah yang diharapkan akan dirasakan anak berusia 7 tahun ke atas di masa depan (Harapan Lama Sekolah atau  $X_3$ ); dan (c) pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (pengeluaran per kapita atau  $X_4$ ). Sumber utama data penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dan Institusi Perguruan Tinggi.

Data dianalisis dengan dua tahap, yakni analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis deskriptif dilakukan dengan memberikan gambaran tentang pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Tengah beserta indikator pembentuknya. Sedangkan, analisis statistik regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui bentuk

dan besaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis akan menggunakan Uji t (parsial) dan Uji F (simultan). Data penelitian diolah dengan perangkat lunak SPSS.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi wilayah penelitian

Lokasi penelitian di Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah. Pemilihan lokasi tersebut atas dasar pertimbangan sebagai berikut: pertama, Provinsi Lampung merupakan provinsi yang IPM nya terendah se-Sumatera sejak 2014 hingga 2017. Kedua, Kabupaten Lampung Tengah merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak dan perkembangan IPM yang stagnan berada di peringkat 3 se-Lampung, namun masih banyak kasus-kasus gizi buruk di kabupaten ini. Kabupaten Lampung Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki luas wilayah seluas 4.789,82 km<sup>2</sup> dan terletak pada 104°35' sampai dengan 105°50' Bujur Timur dan 4°30" sampai dengan 4°15' Lintang Selatan. Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki 28 kecamatan dan 304 kampung/kelurahan ini berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Utara di bagian Utara, Kabupaten Pesawaran di sebelah Selatan, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro di bagian Timur, dan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat di sebelah Barat.

Dari aspek demografis, pada 2016, penduduk Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 1.250.486 jiwa (636.688 laki - laki dan 613.798 perempuan). Berdasarkan kelompok umur, populasi

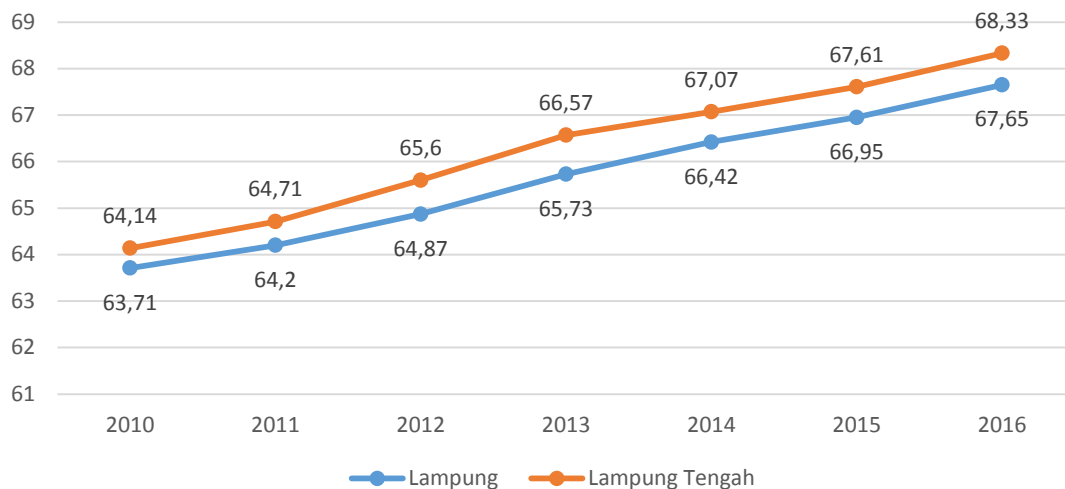
- 1 Jurusan Administrasi Negara Fisip Universitas Lampung
- 2 Jurusan Administrasi Negara Fisip Universitas Lampung
- 3 Jurusan Administrasi Negara Fisip Universitas Sriwijaya

penduduk Kabupaten Lampung Tengah terdiri atas kelompok umur 0 – 14 tahun atau anak – anak (27,10 persen), kelompok umur 15 – 64 tahun atau usia produktif (66, 95 persen), dan kelompok umur >65 tahun atau usia lanjut (5,95 persen). Komposisi struktur umur ini memiliki rasio ketergantungan sebesar 49,36 persen. Artinya, setiap 100 orang penduduk produktif menanggung 49 orang penduduk tidak produktif.

Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi lahan basah seluas 81.783 ha dan potensi lahan kering yang cocok untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura seluas 122.813 ha. Produk pertanian yang dihasilkan Kabupaten Tengah adalah padi (812.788 ton), jagung (317.702 ton), ubi kayu (1.572.178 ton). Di sektor perkebunan, Kabupaten Tengah menghasilkan kelapa sawit (59.298,94 ton), kelapa (6.429,51 ton), kakao (2.969,56 ton), dan kopi (289,75 ton). Selain perkebunan rakyat, Kabupaten Lampung Tengah juga memiliki perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan seperti PTP Nusantara VII yang bergerak pada tanaman sawit, serta Gunung Madu Plantation dan Gula Putih Mataram yang bergerak pada tanaman tebu dan gula. Di sektor peternakan, Kabupaten Lampung Tengah memproduksi sapi (220.453 ekor), kerbau (3.082 ekor), kambing (215.480 ekor), domba (9.296 ekor), babi (12.291 ekor), ayam buras (974.937 ekor), ayam ras pedaging (2.153.700 ekor), ayam ras petelur (734.600 ekor) dan itik (108.397 ekor). Di sektor perikanan, jumlah produksi ikan di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 39.645,83 ton.

### Analisis deskriptif

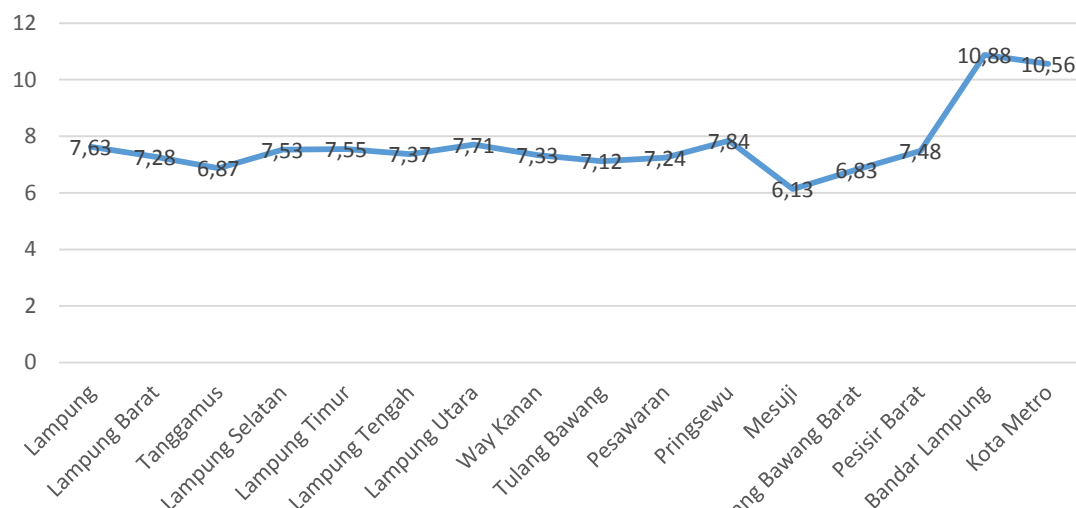
Seperti ditunjukkan Grafik 1, capaian IPM Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya dan berada di atas angka IPM Provinsi Lampung. Sejak 2010, capaian IPM Kabupaten Lampung Tengah meningkat sebesar 4,19 dari 64,14 pada 2010 menjadi 68,33 pada 2016. Peningkatan ini lebih besar jika dibandingkan dengan Provinsi Lampung yang hanya meningkat sebesar 3,94 dari 63,71 pada 2010 menjadi 67,65 pada 2016. Walaupun demikian, capaian IPM Provinsi Lampung maupun Kabupaten Lampung Tengah masih berada pada kategori sedang dan memiliki potensi yang besar untuk menjadi IPM yang berkategori tinggi di masa mendatang.



**Grafik 1. Perkembangan IPM Kabupaten Lampung Tengah dan Provinsi. Lampung. Sumber: BPS Provinsi Lampung (2017)**

Di bidang pendidikan angka IPM memiliki 2 indikator, yakni yang meliputi Rata - CC, Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia >25 tahun dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Capaian RLS penduduk usia >25 tahun di Kabupaten Lampung Tengah berada pada tingkat menengah dengan capaian

sebesar 7,37 atau masih berada pada jenjang pendidikan menengah pertama. Capaian ini berada di bawah capaian RLS Provinsi Lampung yang mencapai 7,63 tahun dan menempatkan Kabupaten Lampung Tengah berada pada urutan 8 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung (lihat Gambar 2)



**Grafik 2. Perbandingan nilai RLS kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2016. Sumber: BPS Provinsi Lampung (2017)**

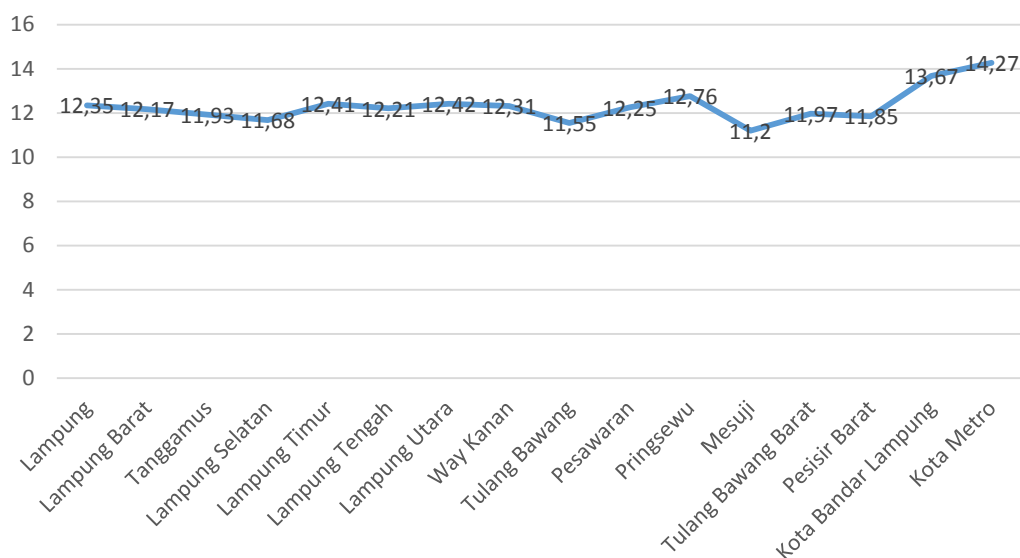
Capaian RLS Kabupaten Lampung Tengah sejalan dengan capaian HLS

Kabupaten Lampung Tengah yang mencapai 12,21 dan menempatkannya

pada peringkat 8 dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Capaian ini masih berada di bawah capaian IPM Provinsi Lampung sebesar 12,21 tahun. Capaian ini artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang di Kabupaten Lampung Tengah adalah selama 12,21 tahun atau setara dengan menempuh pendidikan sampai dengan lulus SLTA atau lebih tepatnya mampu menempuh pendidikan tinggi hingga semester I.

Capaian indikator pendidikan berupa RLS dan HLS di Kabupaten Lampung Tengah menghasilkan nilai indeks pendidikan IPM Kabupaten

Lampung Tengah sebesar 58,48 dan masih di bawah indeks pendidikan Provinsi Lampung sebesar 59,74. Upaya peningkatan indeks pendidikan melalui peningkatan RLS dan HLS dilakukan melalui pendekatan yang berbeda sesuai dengan kondisi obyektif antar wilayah di Kabupaten Lampung Tengah. Peningkatan RLS dapat dilakukan dengan mengubah pola pikir penduduk usia >25 tahun melalui beragam yang diinisiasi pemerintah daerah. Adapun peningkatan HLS dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan kepada setiap anak usia 7 tahun ketas untuk mengakses pendidikan hingga tingkat tinggi.



**Grafik 3. Perbandingan nilai HLS kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2016. Sumber: BPS Provinsi Lampung (2017)**

Di sektor kesehatan, IPM ditentukan oleh Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu di tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah

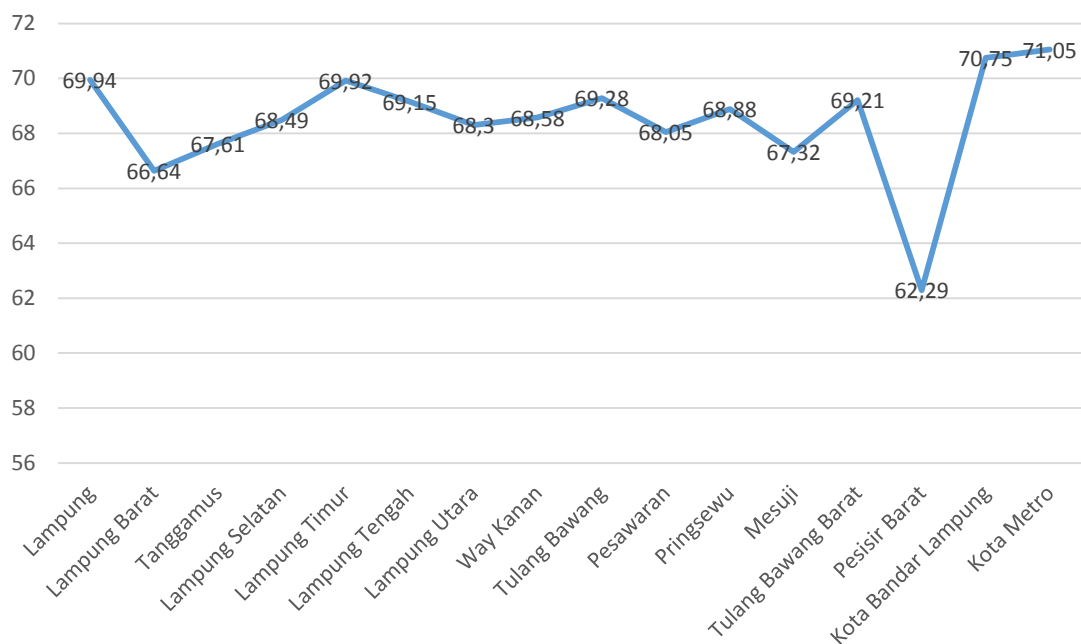
dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan penduduk. AHH yang rendah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.



- 1 Jurusan Administrasi Negara Fisip Universitas Lampung
- 2 Jurusan Administrasi Negara Fisip Universitas Lampung
- 3 Jurusan Administrasi Negara Fisip Universitas Sriwijaya

Capaian AHH Kabupaten Lampung Tengah pada 2016 mencapai 69,15. Artinya, bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2016 akan dapat hidup sampai 69 atau 70 tahun. Capaian AHH Kabupaten Lampung Tengah ini masih berada di bawah capaian AHH Provinsi Lampung sebesar 69,94 tahun. Capaian

AHH ini juga menempatkan Kabupaten Lampung Tengah berada pada posisi 6 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung setelah Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.



**Grafik 4. Perbandingan nilai AHH kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2016. Sumber: BPS Provinsi Lampung (2017)**

Jika menggunakan perhitungan metode baru yang digunakan BPS, maka capaian AHH Kabupaten Lampung Tengah dapat dikonversikan ke dalam capaian indeks kesehatan Kabupaten Lampung Tengah. Adapun besarnya indeks kesehatan Kabupaten Lampung Tengah pada 2016 sebesar 75,62 atau jika menggunakan kategori IPM berada pada posisi tinggi. Adapun capaian indeks kesehatan Provinsi Lampung pada 2016 mencapai 76,83. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah sudah tinggi.

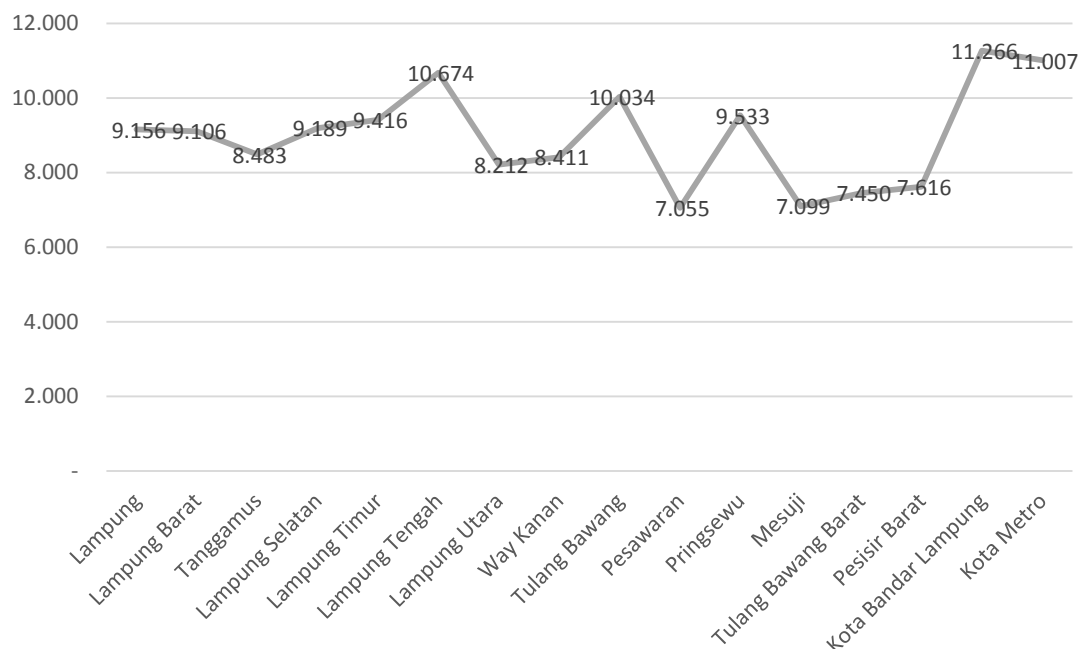
Upaya peningkatan AHH di Kabupaten Lampung Tengah dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran ibu tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak serta peningkatan gizi keluarga. Dukungan pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan juga memiliki peran yang besar dalam upaya peningkatan AHH sehingga sinergi program antar instansi dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat sangat diperlukan.

Di sektor ekonomi yang dijadikan penentu perhitungan IPM adalah Pengeluaran Per Kapita (PPK) disesuaikan yang ditentukan dari nilai

PPK dan Paritas Daya Beli (PDB). Rata-rata PPK setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata PPK dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan PDB dengan metode baru menggunakan 96 komoditas di mana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungan PDB menggunakan Metode Rao.

Capaian PPK Kabupaten Lampung Tengah pada 2016 sebesar 10,674 juta

atau sebesar 29.244 per hari. Capaian ini berada di atas capaian PPK disesuaikan Provinsi Lampung sebesar 9.156 juta dan menempatkan Kabupaten Lampung Tengah berada pada posisi ketiga tertinggi setelah Kota Bandar Lampung (11.266 juta) dan Kota Metro (11.007 juta). Walaupun demikian, hasil PPK disesuaikan tersebut masih belum memenuhi standar hidup layak bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.



**Grafik 5. Perbandingan nilai Pengeluaran Per Kapita kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2016. Sumber: BPS Provinsi Lampung (2017)**

Capaian PPK disesuaikan Kabupaten Lampung Tengah sebesar 10,674 juta menjadikan indeks ekonomi dalam penentuan IPM sebesar 72,13 atau jika menggunakan peringkat IPM telah berada pada kategori tinggi. Upaya peningkatan PPK disesuaikan dapat dilakukan dengan meningkatkan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang

tersedia. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan *softskill* dan *hardskill* masyarakat sangat diperlukan selain dukungan sumber-sumber pembiayaan yang dapat dijangkau masyarakat untuk dijadikan modal dasar usaha.

#### Analisis Regresi

Sebelum melakukan analisis regresi, peneliti melakukan uji asumsi klasik yang

meliputi uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residu yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residu yang terdistribusi secara normal. Metode uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov dengan hipotesis sebagai berikut:

a) Jika probabilitas  $> 0,05$  maka distribusi dari model regresi adalah normal.

b) Jika probabilitas  $< 0,05$  maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

Seperti ditunjukkan Tabel 2, nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,200 yang berarti bahwa hasil signifikansi ini lebih dari 0,05 ( $0,200 > 0,05$ ) dan dapat disimpulkan bahwa nilai residu tersebut adalah normal. Hal ini membuktikan bahwa variabel dalam penelitian ini memiliki sebaran data yang berdistribusi normal. Dengan demikian uji statistik yang digunakan telah memenuhi syarat untuk diuji dengan statistik parametrik.

**Tabel 2. Luaran SPSS tentang uji normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		7
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,00716117
Most Extreme Differences	Absolute	,244
	Positive	,244
	Negative	-,156
Test Statistic		,244
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residu untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Adapun metode pengujian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah uji koefisien korelasi Spearman. Mengacu ke Tabel 3, nilai korelasi ketiga variabel independen dengan *Unstandardized Residual* memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Karena signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

**Tabel 3. Luaran SPSS tentang korelasi parsial**

Correlations		IPM	RLS	HLS	AHH	PKP	Unstandardized Residual	
Spearman's rho	IPM	Correlation	1,000	1,000**	1,000**	1,000**	1,000**	,000
		Coefficient						
		Sig. (2-tailed)	.	.	.	.	.	1,000
	N	7	7	7	7	7	7	7
RLS		Correlation	1,000**	1,000	1,000**	1,000**	1,000**	,000
		Coefficient						
		Sig. (2-tailed)	.	.	.	.	.	1,000
	N	7	7	7	7	7	7	7
HLS		Correlation	1,000**	1,000**	1,000	1,000**	1,000**	,000
		Coefficient						
		Sig. (2-tailed)	.	.	.	.	.	1,000
	N	7	7	7	7	7	7	7
AHH		Correlation	1,000**	1,000**	1,000**	1,000	1,000**	,000
		Coefficient						
		Sig. (2-tailed)	.	.	.	.	.	1,000
	N	7	7	7	7	7	7	7
PKP		Correlation	1,000**	1,000**	1,000**	1,000**	1,000	,000
		Coefficient						
		Sig. (2-tailed)	.	.	.	.	.	1,000
	N	7	7	7	7	7	7	7
Unstandardized Residual		Correlation	,000	,000	,000	,000	,000	1,000
		Coefficient						
		Sig. (2-tailed)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	.
	N	7	7	7	7	7	7	7

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Karena data penelitian memiliki distribusi normal dan tidak mengandung gejala heteroskedastisitas, maka hubungan antar variabel bisa diuji dengan teknik regresi linier berganda. Langkah pertama adalah menguji hubungan antar variabel dengan mencari nilai korelasi *Pearson Product Moment*. Hasil analisis korelasi divisualisasikan Tabel 4. Hasil perhitungan SPSS menunjukkan korelasi IPM dengan RLS berada di angka 0,931. Maknanya, hubungan antara IPM dengan RLS sangat kuat. Semakin tinggi RLS, maka akan semakin tinggi angka IPM, dan begitu

juga sebaliknya. Sementara itu, korelasi antara IPM dengan HLS menghasilkan angka 0,967 yang berarti tingkat hubungan antara IPM dengan HLS sangat kuat. Semakin tinggi HLS, semakin tinggi angka IPM, dan begitu juga sebaliknya. Sedangkan korelasi antara IPM dengan AHH menghasilkan angka 0,962 yang juga menunjukkan kuatnya hubungan antara IPM dan AHH. Dengan kata lain, semakin tinggi AHH, maka semakin tinggi angka IPM, dan begitu juga sebaliknya. Hubungan yang sangat kuat juga ditunjukkan antara IPM dengan PKP yang

menghasilkan angka 0,942. (lihat Tabel 4).

**Tabel 4. Analisis korelasi parsial**

Correlations		IPM	RLS	HLS	AHH	PKP
IPM	Pearson Correlation	1	,931**	,967**	,962**	,942**
	Sig. (2-tailed)		,002	,000	,001	,002
	N	7	7	7	7	7
RLS	Pearson Correlation	,931**	1	,822*	,906**	,964**
	Sig. (2-tailed)	,002		,023	,005	,000
	N	7	7	7	7	7
HLS	Pearson Correlation	,967**	,822*	1	,899**	,829*
	Sig. (2-tailed)	,000	,023		,006	,021
	N	7	7	7	7	7
AHH	Pearson Correlation	,962**	,906**	,899**	1	,947**
	Sig. (2-tailed)	,001	,005	,006		,001
	N	7	7	7	7	7
PKP	Pearson Correlation	,942**	,964**	,829*	,947**	1
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,021	,001	
	N	7	7	7	7	7

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Selanjutnya, peneliti melakukan uji F untuk melihat apakah model regresi layak atau tidak. Layak artinya model yang diestimasi handal untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila nilai prob. F hitung (ouput SPSS ditunjukkan pada kolom sig.) lebih kecil dari tingkat kesalahan/error (alpha) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak, sedangkan apabila nilai prob. F hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi tidak layak. Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 5. Nilai prob. F

hitung terlihat pada kolom terakhir (sig.). Seperti ditunjukkan Tabel 5, nilai prob. F hitung (sig.) adalah 0,000, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh RLS, HLS, AHH, dan PKP terhadap IPM

**Tabel 5. Luaran SPSS tentang ANOVA**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14,185	4	3,546	23051,284	,000 <sup>b</sup>
	Residual	,000	2	,000		
	Total	14,186	6			

a. Dependent Variable: IPM

b. Predictors: (Constant), PKP, HLS, RLS, AHH

Setelah uji F, uji t juga perlu dilakukan terhadap model regresi. Uji t dalam regresi linier berganda dimaksudkan untuk menguji apakah parameter (koefisien regresi dan konstanta) yang diduga untuk mengestimasi persamaan/model regresi linier berganda sudah merupakan parameter yang tepat atau belum. Maksud tepat adalah parameter tersebut mampu menjelaskan perilaku variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikatnya. Parameter yang diestimasi dalam regresi linier meliputi *intercept* (konstanta) dan *slope* (koefisien dalam persamaan linier). Pada bagian ini, uji t difokuskan pada parameter *slope* (koefisien regresi) saja. Jadi uji t yang dimaksud adalah uji koefisien regresi. Apabila nilai prob. t hitung (ouput SPSS ditunjukkan pada kolom sig.) lebih kecil dari tingkat kesalahan (alpha) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas (dari t hitung tersebut) berpengaruh signifikan

terhadap variabel terikatnya, sedangkan apabila nilai prob. t hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai prob. t hitung dari variabel bebas RLS sebesar 0,007, HLS sebesar 0,000, dan PKP sebesar 0,04. Hasil tersebut masih lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel bebas RLS, HLS, dan PKP berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat IPM pada alpha 5%. Dengan kata lain, RLS, HLS, dan PKP berpengaruh signifikan terhadap IPM pada taraf keyakinan 95%. Tetapi, AHH memiliki nilai prob. t hitung (0,28) yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas AHH tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM pada alpha 5%.

**Tabel 6. Luaran SPSS tentang uji t**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	7,208	4,233		1,703	,231		
	RLS	1,345	,114	,152	11,824	,007	,066	15,203
	HLS	1,153	,016	,557	70,522	,000	,174	5,747
	AHH	,392	,067	,080	5,897	,028	,059	17,057
	PKP	,001	,000	,258	15,070	,004	,037	26,999

a. Dependent Variable: IPM

Terakhir adalah membaca koefisien determinasi yang menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya atau proporsi pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi dijelaskan oleh nilai RSquare atau Adjusted R-Square. R-Square digunakan pada saat variabel

bebas hanya 1 saja (biasa disebut dengan Regresi Linier Sederhana), sedangkan Adjusted R-Square digunakan pada saat variabel bebas lebih dari satu. Dalam menghitung nilai koefisien determinasi penulis menggunakan R-Square yang mengandaikan bahwa setiap variabel independen dalam model menjelaskan

variasi pada variabel dependen (lihat Tabel 7)

**Tabel 7. Luaran SPSS tentang simpulan model regresi**

Model Summary <sup>b</sup>						
Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	1,000 <sup>a</sup>	1,000	1,000		,01240	2,676

a. Predictors: (Constant), PKP, HLS, RLS, AHH

b. Dependent Variable: IPM

Jika dilihat dari nilai R-Square yang besarnya 1,000 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel RLS, HLS, AHH, dan PKP terhadap variabel IPM sebesar 100%. Artinya, RLS, HLS, AHH, dan PKP terhadap IPM memiliki proporsi pengaruh sebesar 100% dan tidak ada variabel lain yang ada di dalam model regresi linier.

Setelah estimasi model regresi linier berganda dilakukan dan diuji pemenuhan syaratnya (uji asumsi klasik) serta kelayakan modelnya, maka tahap terakhir adalah menginterpretasikannya. Interpretasi atau penafsiran atau penjelasan atas suatu model yang dihasilkan seharusnya dilakukan setelah semua tahapan (uji asumsi klasik dan kelayakan model) dilakukan. Interpretasi yang dilakukan terhadap koefisien regresi meliputi dua hal, yakni: tanda dan besaran. Tanda menunjukkan arah hubungan. Tanda dapat bernilai positif atau negatif. Positif menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel bebas terhadap

variabel terikat, sedangkan negatif menunjukkan pengaruh yang berlawanan arah. Di sebut searah apabila variabel bebas meningkat maka variabel terikat juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila variabel bebas mengalami penurunan maka variabel terikat juga mengalami penurunan. Berlawan arah artinya apabila variabel bebas mengalami peningkatan maka variabel terikat akan mengalami penurunan. Sebaliknya, apabila variabel bebas mengalami penurunan maka variabel terikat akan mengalami peningkatan.

Besaran menjelaskan nominal *slope* persamaan regresi. Penjelasan tentang besaran dilakukan pada contoh model yang diestimasi. Model (persamaan) regresi linier berganda yang telah diestimasi ditunjukkan Tabel 8.

**Tabel 8. Luaran SPSS tentang model estimasi**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Beta	Tolerance
1	(Constant)	7,208	4,233		1,703	,231		
	RLS	1,345	,114	,152	11,824	,007	,066	15,203
	HLS	1,153	,016	,557	70,522	,000	,174	5,747
	AHH	,392	,067	,080	5,897	,028	,059	17,057
	PKP	,001	,000	,258	15,070	,004	,037	26,999

a. Dependent Variable: IPM

Merujuk ke Tabel 8, maka model persamaan regresi berganda dapat diestimasi sebagai berikut:

$$IPM = 7,208 + 1,345RLS + 1,153HLS + 0,392AHH + 0,001PKP + e$$

Koefisien RLS, HLS, AHH, dan PKP bernilai positif tetapi besaran kontribusi setiap IPM berbeda. Positif artinya jika RLS atau HLS atau AHH atau PKP meningkat, maka IPM juga akan meningkat. Sebaliknya, jika RLS atau HLS atau AHH atau PKP menurun, maka IPM juga akan menurun. Sementara itu, besaran efek perubahan variabel bebas (RLS, HLS, AHH, dan PKP) terhadap IPM tercermin dalam kolom B pada Tabel 8. Jika RLS meningkat 1 tahun, maka nilai IPM akan meningkat sebesar 1,345. Jika RLS menurun 1 tahun, maka nilai IPM juga akan menurun sebesar 1,345. Penjelasan seperti ini juga berlaku bagi HLS, AHH, dan PKP. Dari model ini diketahui bahwa RLS dan HLS memiliki kontribusi lebih besar dibandingkan AHH dan PKP terhadap pembentukan IPM di Kabupaten Lampung Tengah.

#### D. PENUTUP

Transformasi MDGs menjadi SDGs semakin menempatkan pembangunan manusia sebagai elemen penting dalam proses pembangunan, termasuk bagi Indonesia. Riset – riset sebelumnya menunjukkan bahwa IPM bisa diposisikan sebagai variabel bebas atau variabel terikat. Riset ini memosisikan IPM sebagai variabel terikat dan berusaha menguji hubungan beberapa variabel bebas (RLS, HLS, AHH, dan PKP) terhadap IPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki hubungan positif dengan IPM meskipun besaran pengaruh berbeda antar variabel.

Temuan ini menguatkan hasil riset Arthayanti et al., (2017), Maulana & Ariwibowo (2013), dan Astri et al., (2013). Di saat bersamaan, artikel ini menolak temuan riset Putra (2017) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan tidak berdampak signifikan terhadap IPM.

Bertolak dari temuan ini, peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memprioritaskan sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat sebagai fokus pembangunan daerah. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, swasta, lembaga swadaya masyarakat, serta perguruan tinggi dalam meningkatkan sektor pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah perlu mendesain kebijakan pendidikan yang memberikan aksesibilitas masyarakat dalam menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti pemberian beasiswa, penyelenggaraan sekolah yang memadai pada wilayah terpencil, dan membangun sekolah berstandar nasional guna meningkatkan mutu pendidikan. Di sektor kesehatan, pemerintah daerah beserta para pemangku kepentingan perlu terus menggalakkan upaya pencegahan dan pengobatan beragam penyakit. Sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah juga perlu terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Di sektor



perekonomian, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah perlu memperbaiki infrastruktur jalan untuk menarik investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi penduduk. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah juga perlu mendorong lahirnya wirausaha baru dan memfasilitasi beragam kelompok usaha untuk mengakses layanan perbankan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, I. (2006). Pengaruh Pembangunan Manusia Terhadap Kinerja Ekonomi DATI II di Jawa Barat, 1999-2003. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 22(2), 214–234. Retrieved from <http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/210>
- Andykha, R., Handayani, H. R., & Woyanti, N. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(2), 113–123.
- Arthayanti, Y., Srinadi, I. G. A. M., & Gandhiadi, G. K. (2017). Geographically Weighted Ridge Regression dalam Kasus Multikolinearitas Pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Matematika*, 7(2), 124. <https://doi.org/10.24843/JMAT.2017.v07.i02.p89>
- Astri, M., Nikensari, S. I., & W., D. H. K. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 77–102.
- BPS Provinsi Lampung. (2017). *Provinsi Lampung Dalam Angka 2016*. Bandar Lampung: BPS Provinsi Lampung.
- Dwiyandari, L. D. Y., & Badera, I. D. N. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan pada Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1741. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i03.p04>
- Hamid, A. (2014). Analisis Variabel Pembangunan Ekonomi dan Sosial Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 1980 - 2013 (Sebuah Kajian dengan Pendekatan ECM dan VECM). *ESENSI: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 4(1), 1–28.
- Hariwan, P., & Swaningrum, A. (2015). Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1), 72–82.
- Harliyani, E. M., & Haryadi, H. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(3), 129–140.
- Hasbullah, Y., Fauzi, M., Fatimah, S., Yuniarti, Ti., & Syarifudin, S. (2013). Analisis Arah Kebijakan Ekonomi terhadap Sektor

- Pendidikan dalam Peningkatan IPM. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 6(2), 103–213. <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>
- Malik, A. S. (2014). Analisis konvergensi antar provinsi di Indonesia setelah pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001-2012. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 7(1), 92–101. <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3846>
- Mangkunegara, I. (2015). Pengaruh Karakteristik Keuangan dan Hasil Pemeriksaan pada Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 1(2), 141–155.
- Mariyono, J. (2012). Corruption and Welfare: A Simple Econometric Across Countries Analysis. *Economic Journal of Emerging Markets*, 4(1), 63–75.
- Maulana, R., & Ariwibowo, P. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Teknologi Terhadap IPM di Indonesia 2007 - 2011. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 6(2), 103–213. <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>
- Mirza, D. S. (2015). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 4(3), 276–284. <https://doi.org/10.15294/EDAJ.VII.2.474>
- Muljati, S., Triwinarto, A., & Budiman, B. (2011). Determinan Stunting Pada Anak Usia 2-3 Tahun Di Tingkat Provinsi. *Penelitian Gizi Dan Makanan*, 34(1), 50–62.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. England, UK: Pearson Education Limited.
- Nuryunarsih, D. (2017). Counterfeit Medicines in Socioeconomic Perspective. *Kesmas: National Public Health Journal*, 11(4), 153. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v11i4.1440>
- Pramartha, I. M. A., & Dwirandra, A. A. N. B. (2018). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, dan Investasi Swasta terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 2458–2482. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i03.p30>
- Putra, W. (2017). Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Perbatasan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(2), 120–138.
- Rustariyuni, S. D. (2014). Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Periode 2004-2012. *PIRAMIDA*, 10(1), 45–55.

- Sandri, N. K., Putri, I. G. A. M. A. D., & Dwirandra, A. A. N. B. (2016). Kemampuan Alokasi Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 21(1), 71–81. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/bs/article/view/22301>
- Saputra, M. H., & Rizki, C. Z. (2014). Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Quantitative Economic Journal*, 03(04), 246-150.
- Sari, B. N., & Priati, P. (2016). Identifikasi Keterkaitan Variabel dan Prediksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat Menggunakan Dynamic Bayesian Networks. *JURNAL INFOTEL - Informatika Telekomunikasi Elektronika*, 8(2), <https://doi.org/10.20895/infotel.v8i2.123>
- Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2008). Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Economia*, 9(April), 18–26.
- Stanton, E. A. (2007). The Human Development Index: A History. *Political Economy Research Institute Working Paper*, 127(February), 1–36.
- United Nations. (2015a). *The Millennium Development Goals Report 2015*. New York, USA: United Nations.
- United Nations. (2015b). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York, USA: United Nations.